



Shaf: Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf

Vol. 1 No. 2, Maret 2024

E-ISSN: 3025-5937

DOI: <https://doi.org/10.59548>

SISTEM PEMERINTAHAN DESENTRALISASI: Studi atas Penyebab Keruntuhan Daulah 'Abbasiyah

¹Ruwiyah Zam Zam, ²Sayyid Ahsan Alawi

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

²Yayasan Markaz Khidmat Al Islam, Indonesia

Corresponding E-mail: ruwiyahaja@gmail.com

ABSTRACT

The Abbasid Caliphate was one of the powers of the Muslim Ummah. Its emergence after the non-Arab movement fought for equality with the Arabs which was not obtained during the leadership of the Umayyad Daulah. The advantages possessed by the 'Abbasid Daulah besides being symbolized as the golden age of Islam, it turned out that the cause of its collapse was the application of decentralization in running the government, by one of the caliphs of the 'Abbasid Daulah named al-Mutawakkil. This type of research is a literature study or known as Library Research, using a descriptive approach to the findings or references from primary data, relating to the leadership of the 'Abbasid Daulah and the history of Islamic civilization. The decentralized government system applied by al-Mutawakkil was the main cause of the collapse of the 'Abbasid Daulah, this application was due to one of the emergence of small dynasties that wanted to break away from the 'Abbasid Daulah. In addition, al-Mutawakkil's lifestyle was a major factor, namely living in luxury, squandering wealth and so on.

Keywords: 'Abbasid Daulah, Al-Mutawakkil, Decentralization.



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
E-ISSN: 3025-5937, DOI: 10.59548/js.v1i2.119

Pendahuluan

Agama Islam didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk, pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kajian sosiologis, mendefinisikan Islam sebagai fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia (Miftahuddin, 2010) Islam dalam realitas sosial tidak hanya sekedar bersifat doktrin, tetapi mengejewantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi, dan dinamika ruang dan waktu.

Islam dalam realitas sosial, yang mewujudkan dengan berbagai macam peristiwa, serta kejadian masa lalu yang begitu banyak memiliki kandungan nilai-nilai kehidupan, memunculkan gagasan sejarah Islam didalamnya. Sejarah Islam dalam perspektif Ahmad Al-Usaury, yaitu suatu kajian sejarah tentang sebuah bangsa dan negara diawali kemunculan Islam hingga saat ini (Al-Usaury, 2003).

Kajian sejarah Islam telah memberikan warna tersendiri, dalam dunia akademik, dan menjadi perhatian yang mendalam dari berbagai kalangan, khususnya para orientalis, yaitu sekelompok atau golongan yang berasal dari bangsa-bangsa Barat (eropa) yang berkonsentrasi, atau memfokuskan diri dalam mempelajari kajian ketimuran, khususnya dalam hal keilmuan, peradaban dan agama, terutama pada negara Arab, India, dan China (Al-Usaury, 2003).

Berbicara mengenai sejarah Islam, tidak dapat dilepaskan terhadap konteks kajian kekhalifahan—yang dianggap sebagai tema sentral dalam sejarah Islam—oleh kalangan akademisi dianggap sebagai hanya institusi keagamaan. Pandangan ini dianggap sebagai kekeliruan oleh Philip K. Hitti, dan kemungkinan dalam analisisnya bahwa pandangan tersebut adalah hasil dari analogi salah kaprah terhadap kekuasaan Imperium Suci Romawi, dan perbedaan Kristen Modern antara kekuasaan duniawi, dan kekuasaan keagamaan (Hitti, 2008).

Lebih lanjut Philip K. Hitti menjelaskan bahwa dalam pemerintahan Islam, istilah *amr al-mu'minin* diartikan sebagai pemimpin kaum beriman dan memiliki kekuasaan militer yang penuh (Hitti, 2008). Sisi keagamaan, *Amr al-Mu'minin* dipahami sebagai seorang *khalifah* yang memiliki tugas memelihara keimanan rakyatnya, serta berkewajiban memerang orang-orang kafir serta memperluas wilayah kekuasaan Islam atau yang disebut dengan *Dar al-Islam* (Hitti, 2008).

Sistem kekhalifahan dalam perjalanan sejarah Islam, adanya perbedaan antara sistem para *Khulafa Al-Rasyidin*, dengan Daulah Umayyah, dan Daulah 'Abbasiyah. Sistem para *khulfa Al-Rasyidin* menerapkan sistem khilafah yaitu sistem yang menerapkan asas musyawarah sebagai prinsip dasar pemerintahannya. Sistem pemerintahan *khilafah* yang sesuai dengan landasan Agama Islam.

Perbedaan adanya penerapan sistem pemerintahan Daulah Umayyah, dan Daulah 'Abbasiyah dengan *Khulafa Al-Rasyidin*, tidak dijelaskan oleh Philip K Hitti, sebagai kedua Daulah tersebut sistem kerajaan dalam pemerintahannya. Penulisan ini berfokus pada sistem pemerintah desentralisasi Daulah 'Abbasiyah, yang merupakan permulaan keruntuhan Daulah 'Abbasiyah, bahkan dengan penerapan sistem tersebut dikatakan sebagai masa kegelapan Islam.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dalam usaha untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang diteliti sebagaimana adanya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang mengungkapkan sebuah situasi sosial yang akan diteliti secara komprehensif, dan mendalam.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku yang membahas secara detail tentang Daulah Abbasiyah, dan sejarah peradaban Islam

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan seleksi detail dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai subjek penelitian (Nanu, 2021).

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Berdirinya Daulah Abbasiyah

Berdirinya Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari runtuhnya pemerintah Daulah Umayyah, pada tahun 132 hijriyah (Al-Isy, 2003; Al-Usairy, 2003). Kejadian ini merupakan revolusi besar dalam sejarah peradaban Islam, dan mengundang berbagai macam pandangan terhadap kejadian ini. Sejarawan beranggapan bahwasannya revolusi tersebut merupakan revolusi bangsa Persia terhadap pemerintahan Arab (Al-Isy, 2003). Pandangan ini dibantah oleh Willhouzen, orientalis terkemuka, dalam bukunya *Ad-daulah Al-'Arabiyyah*, menjelaskan pandangan para sejarawan yang menyatakan bahwa berdirinya Daulah Abbasiyah merupakan revolusi bangsa Persia atas bangsa Arab merupakan kesalahan yang fatal, melainkan sebuah gerakan hanya ingin menjatuhkan atau meruntuhkan kekuasaan Daulah Umayyah semata (Al-Isy, 2003).

Pandangan Willhouzen tersebut, membuka kembali berbagi macam pendapat terkait munculnya Daulah 'Abbasiyah, namun sebahagian sejarawan Arab meyakini bahwa pendapat Willhouzen adalah yang benar. Pandangan Willhouzen haruslah dikriktik, dikarenakan penulis menemukan bahwasannya pertentangan antara Arab dan Persia masih berlangsung hingga saat ini.

Tentunya tidak berkaitan dengan *'Aqidah*, melainkan kebanggaan golongan, dan harus diakui bahwa Persia merupakan kerajaan yang besar, sedangkan Arab, memiliki kebanggaan yang lain, sebagai wilayah lahirnya baginda Rasulullah SAW, dan kedua-duanya saling membanggakan keunggulan bangsanya, yang tidak dapat dipertemukan. Inilah hikmah dari pesan Nabi Muhammad terhadap para sahabatnya, agar tidak memiliki jiwa fanatisme dalam diri, sebab seseorang yang fanatik ketika meninggal, maka matinya seperti matinya orang jahiliyyah.

Disepakati atau tidak, fanatisme sangatlah berbahaya, dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Fanatisme yang dikatakan dalam bahasa Arab, *ta'assub*, telah terlebih dahulu ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat, bahwasannya kemuliaan di sisi Allah itu terletak pada ketaqwaan. Pembahasan fanatisme dalam kajian ini, dimaksudkan untu mengetahui para pembaca, bahwasanya—*yang dijelaskan pada kajian selanjutnya*—adalah cikal bakal berdirinya Daulah 'Abbasiyah yang menjadi topik kajian penulisan ini (Arbiyah, 2014).

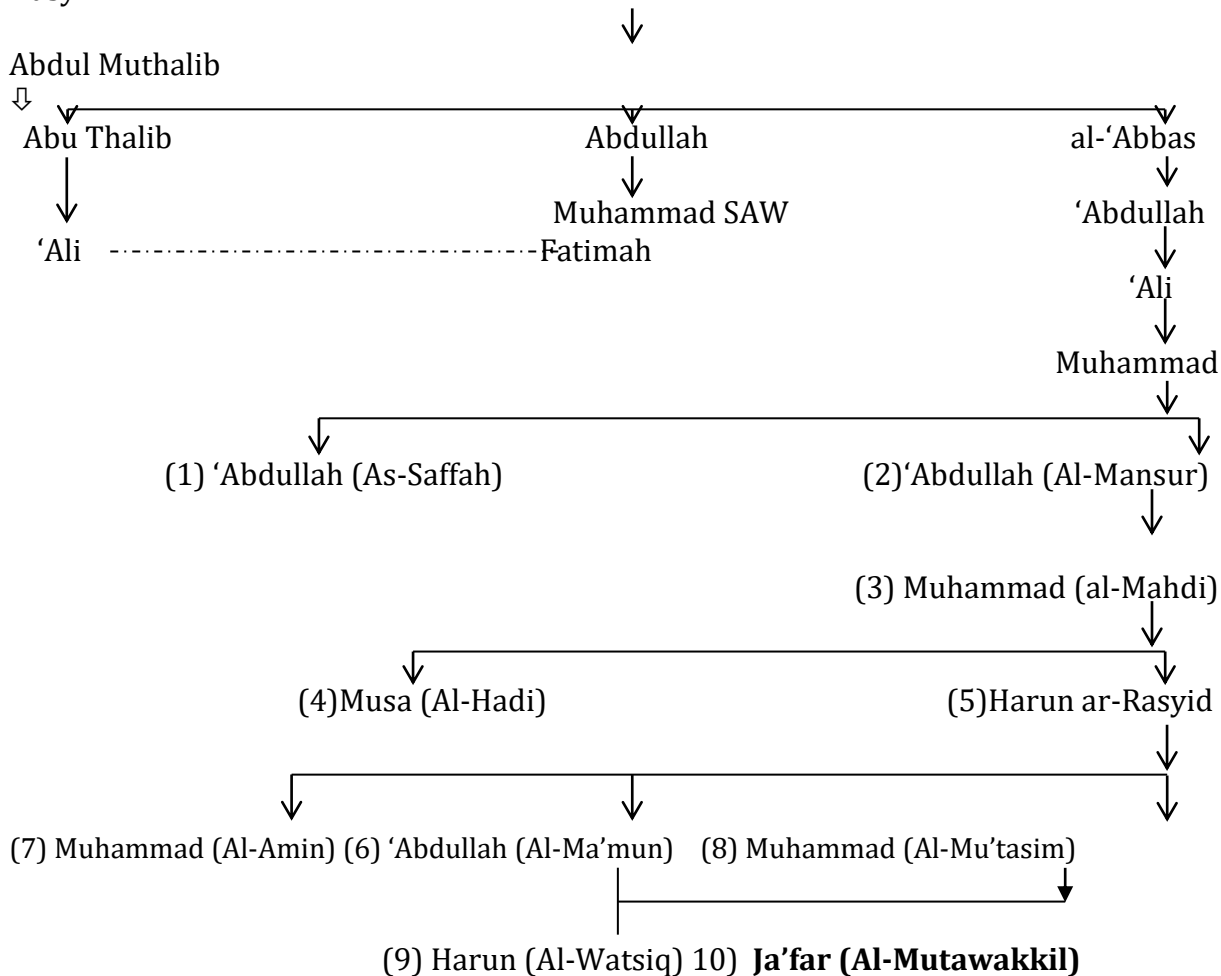
Pertentangan antara Persia dan Arab bukanlah sebagai fokus dalam kajian ini, akan tetapi pemahaman tersebut membuka wawasan yang melatarbelakangi berdirinya Daulah 'Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Daulah 'Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-'Abbas, paman Rasulullah SAW (Al-Usairy, 2003). Berdirinya pemerintahan ini, merupakan kemenangan bagi Bani Hasyim (Alawiyun), yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah SAW, dan anak-anaknya (Al-Usairy, 2003). Montgomery Watt, menjelaskan ihwal berdirinya Daulah 'Abbasiyah dikarenakan adanya tuntutan kaum muslimin yang digolongkan sebagai non-Arab untuk adanya persamaan dengan orang-orang Arab (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990). Desakan ini begitu membara dikarenakan adanya kejenuhan selama kekuasaan Daulah Umayyah, dimana orang non-Arab diperlakukan sebagai kelas atau strata kedua, sehingga banyak yang mengalami penderitaan dan kekurangan dan tuntutan persamaan tersebut tidak hanya berpaku di bidang ekonomi semata melainkan semua aspek (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990).

Pandangan orientalis Montgomery Watt, menggugurkan pandangan Willhouzen, pandangan penulis, bahwa keruntuhan Daulah Umayyah, disebabkan adanya ketidakpuasan serta kejenuhan dari golongan non-Arab. Penulis beranggapan, garda terdepan terhadap runtuhnya Daulah Umayyah,

adalah orang Persia, diyakini berkumpulnya keturunan Nabi Muhammad SAW diantara mereka saat itu.

Dapat dilihat dari Bagan silsilah kepemimpinan Daulah 'Abbasiyah (Al-Usairy, 2003), yaitu:

Hasyim



B. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah adanya proses perpindahan/transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat, kepada lembaga-lembaga pemerintah daerah (Dwiningrum, 2011). Proses perpindahan tersebut, menjadi urusan rumah tangga yang semula menjadi wewenang pemerintah pusat, beralih menjadi wewenang/tanggung jawab pemerintah daerah.

Sistem sentralisasi ataupun desentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pola pemerintahan keduanya telah diterapkan oleh dinasti yang berkuasa dalam sejarah peradaban Islam, termasuk Daulah Abbasiyah. Periode penerapan sistem desentralisasi pada Daulah Abbasiyah, tatkala kekuasaan yang dipegang oleh khalifah sudah memudar. Akhirnya pemerintah pusat memberikan kewenangan secara otonom kepada wilayah di daerah untuk mengatur serta bertanggung jawab urusan rumah tangga-nya.

C. Sistem Pemerintahan Desentralisasi Ja'far al-Mutawakkil

Analisis Montgomery Watt menunjukkan bahwasannya pergeseran kekuasaan yang berujung kepada keruntuhan imperium Daulah 'Abbasiyah¹, tatkala meninggalnya khalifah Al-Wathiq pada bulan Juli 847 Masehi, tanpa meninggalkan wasiat atau penunjukan untuk mengatur penggantian tahta (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990). Menariknya, Philip K. Hitti dalam bukunya *History of Arabs* tidak menguraikan penyebab terjadinya pergeseran sistem pemerintahan Daulah 'Abbasiyah, dikarenakan ini merupakan hal yang rumit sehingga Philip K. Hitti tidak mau terjebak kepada analisa yang kabur (Hitti, 2008).

Pasca meninggalnya, wazir mencari pengganti tahta, putra khalifah masih terlalu muda untuk dijadikan khalifah, pada akhirnya jabatan khalifah tersebut diserahkan kepada saudara laki-laki khalifah yaitu Ja'far Al-Mutawakkil. Pemerintahan Al-Mutawakkil dalam analisis Montgomery Watt, dianggap sebagai masa kemakmuran, ketentraman, dan kebahagiaan (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990).

Ketentraman yang dimaksud oleh Montgomery Watt, dalam analisa penulis, adalah dalam jangka pendek, dikarenakan selama pemerintahannya terjadi perubahan kebijakan pada awal pemerintahannya. Montgomery Watt, beranggapan bahwa terjadi pergeseran pada pemerintahan Al-Mutawakkil dikarenakan adanya kelompok yang berjasa mendudukkan Al-Mutawakkil diatas tahta, dan akhirnya mengendalikan kebijakan negara (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990).

Kebijakan utama dalam pemerintahan Al-Mutawakkil difokuskan adalah menghentikan gerakan bangsa Turki, salah satu ancaman utama terhadap kedudukannya sebagai khalifah. Adanya Gerakan bangsa turki, menyebabkan Al-Mutawakkil melakukan beberapa kesalahan dalam pemerintahannya, diantaranya, *Pertama*, menghambur-hamburkan uang negara untuk membangun istana; *Kedua*, membangun kota samara, dan kota Al-Mutawakkilah (Al-Isy, 2003).

Kesalahan terbesar Al-Mutawakkil, dan merupakan penyebab utama dari keruntuhan kekuasaannya, yaitu Al-Mutawakkil berwasiat untuk mewariskan tahta kerajaannya kepada tiga anaknya, yaitu *Al-Muntashir*, *Al-Mu'taz*, dan *Al-Mu'ayyid*, dan *Al-Muntashir* sebagai anak yang paling besar, mendapatkan bagian yang paling besar (Al-Isy, 2003).

Pembagian tersebut dalam analisa penulis, merupakan faktor utama terjadinya sistem pemerintahan desentralisasi Daulah 'Abbasiyah. Sistem pemerintahan tersebut, merupakan awal kehancuran dari Daulah 'Abbasiyah, dikarenakan keputusan Al-Mutawakkil memberikan bagian yang besar terhadap Al-Muntashir, menyebabkan terjadinya perselisihan satu sama lain. Perselisihan tersebut menjadikan Al-Mutawakkil murka terhadap anaknya, khususnya Al-Muntashir. Al-Mutawakkil merubah keputusannya dengan memberikan harta yang banyak kepada anak keduanya, yaitu *Al-Mu'taz*, dan menelantarkan *Al-Muntashir* (Al-Isy, 2003).

Peristiwa ini merupakan salah satu bukti otentik terjadinya kekacauan internal pada pemerintahan Al-Mutawakkil, dengan tidak konsistennya terhadap keputusan pertamanya yaitu memberikan kekuasaan atau tahta kerajaan kepada *Al-Muntashir*, menjadikan kemarahan serta kekesalan Al-Muntashir, dan peluang bangsa Turki semakin terbuka—*yang ingin menjatuhkan serta merebut kekuasaan Al-Mutawakkil*—mulailah mendekati anak pertamanya yaitu *Al-Muntashir*.

Bangsa Turki berhasil mendekati, bahkan bersekutu dengan *Al-Muntashir*, dengan tujuan utama yaitu membunuh Al-Mutawakkil. Akhirnya persekutuan keduanya berhasil membunuh Al-Mutawakkil diatas meja minuman, tatkala Al-Mutawakkil dalam keadaan mabuk (Al-Isy, 2003). Beberapa sumber menyebutkan, keseharian Al-Mutawakkil jauh dari nilai-nilai ke-Islaman. Salah satu sumber tersebut, yaitu buku karangan Faraq Farouda, *Kebenaran yang Hilang; Sisi Kelam Praktik Politik Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim*, beliau al-Mutawakkil, sangat dikenal soal kegilaannya akan nikmat hidup dan minuman berselera, bahkan beliau memiliki empat ribu orang selir, semuanya konon sudah pernah dirasakannya (Fouda, 2008).

Pernyataan Faraq Farouda tentunya tidak serta-merta harus diterima, sebab dalam pernyataannya, beliau mengungkapkan kata-kata "Konon", yang mengandung antara benar dan tidak, hanya sebatas prasangka semata. Faraq Farouda, kemudian melanjutkan dengan pernyataan kisah-kisah seperti ini—*Al-Mutawakkil dengan 4.000 selir*—selalu terbungkam, terlarang dan menyangkut persoalan penguasaan di dalam Islam (Fouda, 2008).

Pernyataan tersebut tidaklah terbukti, dikarenakan dalam penelitian penulis, bahwasannya seluruh fakta sejarah dalam dunia Islam selalu terbuka dan tidak ada yang ditutupi, sebagai contoh yang telah penulis jelaskan bahwasannya sejarah mengakui Al-Mutawakkil dalam kesehariannya jauh dari nilai-nilai ke-Islam-an, tatkala dibunuh, beliau dalam keadaan mabuk.

Persoalan pengungkapan sejarah umat Islam di masa lalu, adalah objektif dalam menganalisisnya, dan tentunya tidak memiliki unsur atau tujuan apapun dalam mengkajinya. Faraq Fouda menjelaskan mengenai Al-Mutawakkil dalam halaman selanjutnya, dan juga terdapat kata konon didalam pernyataannya, yaitu, Khalifah Al-Mutawakkil, telah meniduri 4.000 gundik selama seperempat abad masa kepemimpinannya (Fouda, 2008).

Kata konon tersebut, tidak dapat dijamin kebenarannya, dan walaupun penulis tidak menolak bahwasanya kehidupan kemewahan dengan para gundik sangat lekat dalam kehidupan pemerintahan yang memiliki sistem kerajaan. Kehidupan seperti inilah yang menyebabkan jatuhnya Al-Mutawakkil dari singgasana kerajaannya, dan sejarah juga mencatat bahwa dalam periode beliau, terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi.

Pergeseran tersebut dalam pandangan penulis, memunculkan lahirnya berbagai macam dinasti kecil, yang juga merupakan keruntuhan imperium Daulah 'Abbasiyah. Kajian mengenai sejarah Daulah 'Abbasiyah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Montgomery Watt—*telah disebutkan pada halaman sebelumnya*— bahwa perubahan kebijakan serta percaturan politik pada masa Al-Mutawakkil, adalah rumit dan kabur, dan belum lagi dipelajari secara rinci, sehingga penjelasan yang akan diberikan masih bersifat sementara (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990).

D. Keruntuhan Daulah Abbasiyah

Penerapan sistem desentralisasi, dalam analisa beberapa kalangan bahwa lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan, daripada sistem pemerintahan sentralisasi. Kekurangan dari penerapan sistem desentralisasi, yaitu adanya perasaan euphoria yang berlebihan, dimana pemerintah daerah yang diberikan wewenang, lebih mengutamakan kepentingan golongannya, daripada kepentingan rakyat, serta sistem ini juga memunculkan oknum atau pribadi yang mengeruk keuntungan. Penilaian beberapa kalangan tersebut, terjadi di dalam kekuasaan Daulah 'Abbasiyah.

Pemerintahan Daulah 'Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad, Irak, bertahan selama seratu tahun dalam kekuasaanya menyatukan kesatuan wilayah Islam yang utuh. Kesatuan wilayah tersebut, pada akhirnya terpecah, dengan ditandai berdirinya dinasti-dinasti kecil, di Barat, dan Timur Baghdad. Inilah awal dari penerapan sistem pemerintahan desentralisasi dalam kekuasaan Daulah 'Abbasiyah, dimaknai sebagai awal keruntuhan/perpecahan Daulah 'Abbasiyah. Philip K Hitti, mendeskripsikan bahwa Islam tidak lagi mampu mempersatukan umatnya ke dalam sebuah kesatuan, seperti halnya kekhalifahan yang tidak mampu menggabungkan wilayah-wilayah sepanjang kawasan Mediterani dengan Asia Tengah dalam satu unit yang stabil (Hitti, 2008).

Akar permasalahan yang dideskripsikan oleh Philip K Hitti merupakan sebuah tiadanya pilihan untuk menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahan Daulah 'Abbasiyah dikarenakan adanya pembagian kekuasaan di daerah-daerah yang selalu mengiringi setiap penaklukan yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak tuntas (Hitti, 2008). Berbagai macam faktor terjadinya perpecahan tersebut, salah satunya yaitu adanya konflik internal dalam keluarga khalifah, dan upaya untuk melakukan pemberontakan serta pembunuhan terhadap khalifah.

Terbaginya wilayah kekuasaan Daulah 'Abbasiyah, perlahan-lah melemahkan kekuatan politik di pemerintahan pusat. DR Arbiyah Lubis dalam bukunya *ISLAM DI ABAD PERTENGAHAN; Kekuatan Politik Islam Pasca Jatuhnya Baghdad*, menjelaskan, pada abad kesepuluh, terjadi ketidakmenentuan di bidang politis, yang menjadikan dunia Islam tidak lagi dapat berfungsi efektif sebagai sebuah unit politik, namun khalifah tetap memiliki dua fungsi, religius dan simbolis, setelah disintegrasi (Arbiyah, 2014).

Disintegrasi dalam kekuasaan Daulah 'Abbasiyah, yang menjadi penyebab utamanya yaitu lemahnya institusi khalifah (Arbiyah, 2014). Arbiyah Lubis, menjelaskan bahwa kemajuan dan kemunduran pemerintahan Islam, bergantung kepada tiga perangkat yang mengendalikan pemerintahan, yaitu khalifah, wazir, militer, ketiganya dapat menciptakan kondisi sosial politik di sebuah pemerintahan (Arbiyah, 2014).

Philip K Hitti, mendefinisikan keruntuhan Daulah Abbasiyah keadaan internal sebagai penyebab kehancuran Daulah 'Abbasiyah, yaitu, *Pertama*, metode Administrasi yang diterapkan tidak kondusif bagi penciptaan stabilitas negara; *Kedua*, eksploitasi dan pajak berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat, tak terkecuali; *Ketiga*, garis perpecahan antara Arab, dan non-Arab, antara muslim Arab dan muslim baru, antara muslim dan kaum *dzimmi*, tetap terlihat tajam; *Keempat*, internal orang Arab, sentimen lama antara utara dan selatan masih tetap ada; *Kelima*, orang Persia-Iran, Turki, dan Berber Hamit tidak pernah berpadu dalam satu kesatuan homogen dengan orang Arab Semit; *Keenam*, Pertikaian yang tidak berkesudahan, dan persaingan untuk menjadi pewaris tahta yang tidak pernah dipastikan; *Ketujuh*, standar kehidupan mewah, yang menonjolkan minuman keraqs, dan nyanyian, dapat melemahkan vitalitas keluarga, dan menghasilkan keturunan-keturunan yang lemah, yang senantiasa memegang tahta (Hitti, 2008).

Adapun keruntuhan Daulah Abbasiyah dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari empat faktor, diantaranya, *Pertama*, pembebanan pajak dan pengaturan wilayah provinsi-provinsi demi keuntungan kelas penguasa telah menghancurkan bidang pertanian, dan industri; *Kedua*, para penguasa semakin kaya, rakyat justru semakin miskin; *Ketiga*, Dalam negara-negara

bagian, tumbuh sejumlah negara-negara kecil yang terbiasa membohongi rakyatnya; *Keempat*, turunnya tingkat intelektualitas masyarakat, dan mengekang tumbuhnya pemikiran kreatif (Hitti, 2008).

Berbeda halnya dengan Philip K. Hitti, analisa Montgomery Watt, terdapat tiga faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah 'Abbasiyah, yaitu *Pertama*, luasnya wilayah yang harus dikendalikan, jika dilihat lambatnya komunikasi; *Kedua*, salah satu persyaratan untuk mempersatukan wilayah yang sangat luas tersebut yaitu keharusan suatu tingkat saling percaya yang tinggi di kalangan penguasa-penguasa utama, dan para pelaksana pemerintahan; *Ketiga*, meningkatnya ketergantungan kepada tentara bayaran, dan ini pada gilirannya mungkin berhubungan dengan perkembangan-perkembangan dalam teknologi militer; *Keempat*, keuangan (terpenting). Khalifah tidak sanggup memaksakan pengiriman pajak ke Baghdad, dan dengan demikian penghasilan menurun. Tidak adanya bank yang dapat dimintai pinjaman uang oleh khalifah, maka jalan satu-satunya dalam kedaruratan keuangan ialah dengan menerapkan denda yang besar, atau menyitanya dengan seenaknya (Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, 1990).

Munculnya dinasti-dinasti kecil terjadi secara menyuluruh pada wilayah kekuasaan 'Abbasiyah, tidak hanya di bagian timur, bagian barat yang berada di tempat yang jauh dari jangkauan Baghdad (Arbiyah, 2014). Penulis membagikan skema terbentuknya dinasti-dinasti kecil pada masa kekuasaan Daulah 'Abbasiyah sebagai berikut, *Pertama*, bagian barat, diantaranya Dinasti Idrisiyah (Madzhab Syiah Itsna 'Asyariyyah *Imamiyah*), Dinasti Rustamiyah (Madzhab Khawarij); Dinasti Fathimiyyah (Madzhab Syiah Isma'iliyyah) Dinasti Aghlabiyyah (Madzhab Sunni) (Arbiyah, 2014). Philip. K. Hitti, dalam bukunya *History of Arabs*, menambahkan, Dinasti Thulun (868-905); Dinasti Hamdaniyah (935-969); Dinasti Iksidiyah (935-946) (Hitti, 2008); *Kedua*, bagian timur, Dinasti Thahiriyyah; Dinasti Shafariyyah; Dinasti Samaniyyah; Dinasti Ghaznawi (Arbiyah, 2014)

Arbiyah Lubis, dalam perspektifnya menjelaskan bahwa kemunculan dinasti-dinasti kecil tersebut, diketahui semenjak jatuhnya Baghdad, dan hancurnya khilafah Islam. Uniknya, dengan kemunculan dinasti-dinasti kecil, umat Islam dengan golongannya masing-masing, dikarenakan tidak adanya ikatan pemersatu yang menyatukan kekuatan politik Islam di bawah bendera khilafah (Arbiyah, 2014). Berdirinya Dinasti Fathimiyyah, dan Daulah Umayyah jilid kedua di Spanyol juga tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan dinasti-dinasti kecil tersebut. Kemunculan Daulah 'Abbasiyah II, dengan adanya keinginan terselubung dari masing-masing kekuatan politik Islam untuk menegakkan kembali khilafah, muncullah tiga kerajaan besar, yaitu Dinasti Turki Usmani di Turki, Dinasti Shafawiyah di Iran, dan Dinasti Mughal di India.

Kesimpulan

Kajian sejarah Islam terus bergulir dalam dunia akademik, dikarena begitu banyak persoalan dan teka-teki yang belum diketahui oleh khalayak ramai, salah satunya dengan perubahan sistem sentralisasi kepada desentralisasi. Perubahan sistem tersebut dalam pemerintahan Daulah 'Abbasiyah merupakan ujung kehancuran, serta terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, dengan munculnya golongan, atau dinasti-dinasti kecil.

Keruntuhan Daulah 'Abbasiyah dimaknai oleh sejarawan, walaupun menurut Montgomery masih rumit dan kabur, tetapi dapat dipetik intisarinnya, bahwa adanya kekacauan internal, dalam institusi khalifah. Kekacauan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa kalangan, untuk memunculkan kerajaan tersendiri.

Perbedaan pendapat dari para kalangan peneliti masih terjadi dalam mengungkapkan kebenaran sejarah Daulah 'Abbasiyah, Faraq Fouda mengungkapkan bahwasanya kehidupan para khalifah telah jauh dari nilai-nilai ke-Islam-an, yaitu dengan adanya gundik sebanyak 4.000, bahkan diyakini oleh Faraq, bahwa Al-Mutawakkil telah meniduri kesemuanya. Berbeda halnya dengan pendapat Montgomery Watt, bahwa sejarah Daulah 'Abbasiyah masih rumit, kabur, dan bersifat sementara.

Pandangan Montgomery ini menunjukkan bahwasannya kajian mengenai Daulah 'Abbasiyah tidaklah berhenti, melainkan terus berlanjut penelitiannya. Tantangan dalam menelitinya yaitu mampu membedakan pengaruh kecintaan terhadap keyakinan seseorang, yang melahirkan sikap fanatisme.

Fanatisme memberikan perhatian tersendiri terhadap pergolakan Daulah 'Abbasiyah, karakter fanatik, sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis, dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan, dan menjadikan pikiran umat manusia *jumud*, tidak berkembang, dan tentunya tanpa disadari, akan menyebabkan keruntuhan, baik secara personal, maupun secara organisasi.

Kajian ini tentunya dapat memberikan semangat akademik, yaitu untuk kembali merumuskan teka-teki pergolakan Daulah 'Abbasiyah—*hingga saat ini masih dapat dirasakan*— dapat dijadikan petikan hikmah untuk masa saat ini, sebab dengan mengambil *I'tibar* atau pengalaman, dapat terhidarkan dari kesalahan, khususnya dalam pengambilan keputusan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Isy, Y. (2003). *Dinasti Abbasiyah* (A. Munandar (ed.); Edisi I). Penerbit Al-Kautsar.
- Al-Usairy, A. (2003). *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abada XX* (S. Rahman (ed.); Edisi, Rev). Penerbit Akbar Media Eka Sarana.
- Arbiyah, L. (2014). *Islam di Abad Pertengahan: Kekuatan Politik Islam pasca Jatuhnya Baghda* (H. Yazid (ed.); Edisi I). Penerbit Yayasan Pena.

- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Edisi 1).
- Fouda, F. (2008). *Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim* (Vovriantoni (ed.); Edisi I). Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina.
- Hitti, P. K. (2008). *History of Arabs* (C. L. Yasin (ed.); Edisi I). Penerbit Serambi Ilmu Semesta.
- Miftahuddin. (2010). *BerIslam Ideal: Refleksi Sejarah Masa Muhammad dan Al-Khulafa Al-Rasyidin*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nanu, R. P. (2021). *Kata Kunci: Pemikiran Pendidikan, M. Naquib Al-Attas*. 05(02), 14–29.
- Watt, W. Montgomery & Hadikusumo, H. (1990). *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (Edisi I). Penerbit Tiara Wacana.